

Analisis Pemahaman UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM Pada UMKM Binaan Dinas Koperasi Dan UKM Di Kota Medan

Muhammad Bahtiar Hutapea¹, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan²

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2 April 2023

Revised: 11 Mei 2023

Accepted: 28 June 2023

Keywords:

MSME,
Financial Report,
SAK EMKM.

Correspondence:

Muhammad Bahtiar Hutapea
bahtiarjunior5@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang mudah dipahami bagi pelaku usaha kecil menengah (UMKM). Populasi dalam penelitian ini adalah 1.672 pelaku UMKM, sedangkan sampel survei adalah 10 pelaku UMKM di lima kecamatan di Kota Medan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancara kepada para pemangku kepentingan UMKM. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM pada Kelompok Usaha Mikro tidak menyusun dan melaporkan laporan tahunannya. Namun, sebagian besar UMKM skala kecil menengah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan baik secara manual maupun melalui komputer. Selain itu, sebagian besar UMKM belum pernah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan, khususnya pencatatan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pengelola UMKM menginginkan adanya pelatihan dan dukungan pendanaan serta pelaporan dari pemerintah atau instansi lainnya. Informasi ini penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memberikan saran dan arahan tentang tata kelola perusahaan di masa mendatang.

This study aims to describe an easy-to-understand financial recording and reporting system for small and medium-sized enterprises (MSMEs). This population consists of 1,672 MSME actors, and the survey sample consists of 10 MSME actors in five sub-districts in the city of Medan. Data was collected through surveys and interviews with MSME stakeholders. The data analysis method used is descriptive analysis. The results showed that most of the MSMEs in the Micro Business Group did not collect and report their annual reports. However, most small and medium-sized MSMEs do financial recording and reporting both manually and on a computer. In addition, most MSMEs have never attended financial management training, especially financial recording and reporting. Therefore, MSME managers want training and funding, and reporting support from the government or other agencies. This information is important for local governments and related agencies in providing advice and guidance on corporate governance in the future.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini tengah menuju era Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan integrasi teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi (Schwab, 2016). Pemerintah Indonesia aktif berupaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kewirausahaan, khususnya yang berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Kemenkeu RI, 2020). Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala signifikan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas (OECD, 2018). Tantangan ini semakin kompleks di tengah tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

UMKM dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat (Utami & Lantu, 2018). Meskipun dikenal sebagai pelaku ekonomi yang fleksibel, banyak UMKM mengalami kesulitan dalam hal pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang memadai (Brigham & Houston, 2019). Pencatatan transaksi harian yang sesuai dengan standar akuntansi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM (Horngren et al., 2018).

Masalah ini semakin diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan akses terhadap pelatihan yang memadai.

Sebagai entitas bisnis non-publik, UMKM pada dasarnya tidak diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan kepada publik (IAI, 2016). Namun, seiring dengan perkembangan usaha, banyak UMKM yang mulai berinteraksi dengan berbagai pihak eksternal seperti pemasok, mitra bisnis, dan lembaga keuangan, sehingga membutuhkan sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan dan terstandarisasi (Berger & Udell, 2006). Informasi akuntansi yang andal dan tepat waktu menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang strategis (Warren et al., 2020). Tanpa sistem akuntansi yang memadai, UMKM akan kesulitan dalam mengevaluasi kinerja usaha dan merencanakan pengembangan bisnis ke depan.

Rendahnya pemahaman tentang Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) di kalangan pelaku UMKM menyebabkan banyaknya praktik pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku (Sugiyono, 2019). Banyak pengusaha UMKM yang masih menganggap bahwa pencatatan akuntansi bukanlah hal yang penting dalam menjalankan bisnis (Cooper & Schindler, 2017). Persepsi ini berdampak negatif terhadap kemampuan pengendalian keuangan dan manajemen risiko usaha (Yuliarti, 2020). Di Kota Medan khususnya, masalah ini menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pertumbuhan dan perkembangan UMKM binaan Dinas Koperasi setempat (Dinas Koperasi Medan, 2021).

Mayoritas pelaku UMKM lebih mengandalkan pengalaman empiris dalam menjalankan bisnis daripada melakukan analisis keuangan yang komprehensif (Hasibuan, 2021). Hasil penelitian di Kota Medan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM hanya melakukan pencatatan sederhana mengenai pemasukan dan pengeluaran, tanpa menyusun laporan keuangan yang lengkap dan sistematis (Ross et al., 2016). Padahal, perhitungan laba rugi yang akurat harus mempertimbangkan berbagai komponen biaya operasional di luar biaya produksi (Garrison et al., 2018). Tanpa pemahaman yang memadai tentang konsep akuntansi dasar, banyak pelaku UMKM yang tidak dapat menentukan secara tepat apakah usaha mereka benar-benar menguntungkan atau tidak.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan memegang peran penting sebagai fasilitator dalam pengembangan UMKM lokal, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang No. 20/2008). Data tahun 2021 menunjukkan bahwa dari total 1.546 usaha mikro yang tercatat di Medan, sebagian besar belum memenuhi standar akuntansi yang berlaku (BPS Kota Medan, 2021). Koperasi sebagai lembaga keuangan alternatif bagi UMKM juga menghadapi kendala dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan anggotanya (Anthony & Govindarajan, 2007). Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam membina UMKM, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan.

Studi kasus pada UMKM Roti Bakar Dijamin dan Bengkel Las Regar di Kota Medan mengungkapkan rendahnya tingkat adopsi SAK EMKM di kalangan pelaku usaha (Yin, 2018). Kedua usaha tersebut mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang memadai, terutama dalam hal pencatatan aset dan kewajiban, karena kurangnya pemahaman dan pelatihan (IAI, 2016). Padahal, laporan keuangan yang disusun sesuai standar dapat membuka akses yang lebih luas terhadap sumber pendanaan eksternal (Myers & Brealey, 2018). Minimnya transparansi keuangan ini menjadi salah satu faktor yang membatasi perkembangan usaha mereka ke tingkat yang lebih besar.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang telah berlaku efektif sejak tahun 2018 belum diimplementasikan secara optimal karena terbatasnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan pelaku UMKM (IAI, 2016). Di Kota Medan khususnya, rendahnya pengetahuan tentang standar akuntansi ini menjadi salah satu penghambat utama dalam menciptakan transparansi keuangan di sektor UMKM (Kieso et al., 2019). Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan praktisi bisnis, untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas UMKM dalam pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan akuntabel.

Kajian Pustaka

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut (Pulungan and Suwita 2020) usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik berbeda-beda. Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memberikan status keuangan, kinerja, dan informasi arus kas untuk membantu pengguna laporan keuangan membuat keputusan dan kebijakan keuangan dan menunjukkan tanggung jawab

manajemen atas penggunaan sumber dayayang dipercayakan. Diharapkan memiliki laporan keuangan yang menganalisis kinerja keuangan. Namun penerapan akuntansi keuangan pada UMKM di Kota Medan masih sedikit dan memiliki banyak kelemahan.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (Gusnardi And Amir Hasan 2018)

Tujuan laporan keuangan Menurut (ED SAK EMKM 2016) Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja usaha untuk membantu berbagai pengguna membuat keputusan keuangan bagi mereka yang tidak dapat meminta laporan keuangan tertentu untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Pengguna ini termasuk penyedia sumber daya usaha seperti kreditur dan investor. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan tahunan juga menunjukkan tanggung jawab manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pemahaman

Menurut (Pulungan and Suwita 2020). Menyatakan bahwa Pemahaman adalah kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, yang berarti bahwa seseorang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima.

Menurut (Issn:2018) menyatakan bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi dunia orang lain. Berdasarkan hal tersebut yaitu mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam berbisnis (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati. Pemahaman Merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain.

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh pemahaman dari apa yang telah diterima atau diperolehnya melalui diskusi tentang sesuatu. SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang digunakan oleh UKM untuk menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum agar pengguna laporan keuangan atau pihak internal dan eksternal dapat mengukur, mengklasifikasikan (membedakan), dan menampilkan laporan keuangan. Sesuai dengan standar dan peraturan SAK EMKM yang berlaku.

Ada tingkat pemahaman minimum. Artinya, penerjemahan, interpretasi pemahaman pada tingkat kedua, ekstrapolasi pemahaman pada tingkat tertinggi. Tiga tingkat pemahaman bisa sulit untuk dibedakan. Itu tergantung pada isinya. Dalam penelitian ini, pengertian yang dimaksud dalam adalah pemahaman tentang tata kelola UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas kecil dan menengah. (SAK EMKM) Pemahaman ini diawali dengan pemahaman dasar akuntansi aset, kewajiban, dan modal. Selanjutnya, memahami standar akuntansi UKM, terutama yang berkaitan dengan pengukuran, asumsi, dan laporan keuangan.

Konsep dasar pemahaman dasar akuntansi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu aset/ harta merupakan aset yang dimiliki oleh entitas perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud. Utang dan ekuitas, yang sering dikenal sebagai kewajiban, merupakan sumber pendanaan untuk operasi perusahaan. Sumber pendanaan ini dapat berupa pinjaman dari kreditur atau penyertaan modal dari pemilik perusahaan. Para pelaku UMKM dapat diartikan paham, jika dalam pengukuran unsur- unsur laporan keuangan berdasarkan biaya historis suatu aset sama dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan, sedangkan biaya historis liabilitas sama dengan biaya kas atau setara kas yang diterima. Atau jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam kegiatan usaha normal. Pelaku UMKM dapat dikatakan paham jika menyajikan laporan keuangan secara wajar, setidaknya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 18 Mei 2016. SAK EMKM akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan mulai 1 Januari 2018. Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Usaha Kecil (SAK EMKM), standar ini bertujuan untuk:

1. Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Mikro, dan UKM (SAK EMKM) dimaksudkan untuk digunakan

oleh usaha mikro, dan UKM

2. Standar Akuntansi Keuangan Bagi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) digunakan untuk entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), jika otoritas mengizinkan entitas untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Laporan keuangan disusun memiliki tujuan yaitu menurut Syafri adalah Laporan keuangan merupakan hasil dan hasil dari proses akuntansi. Laporan keuangan ini merupakan sumber informasi bagi pengguna sebagai salah satu komponen proses pengambilan keputusan. Selain bersifat informasional, laporan keuangan juga bersifat akuntabel atau akuntabel. Sekaligus, jelaskan indikator keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. (Gusnardi And Amir Hasan 2018).

Tujuan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Usaha Kecil (SAK EMKM) adalah untuk memberikan informasi dan hasil keuangan bagi perusahaan yang membantu sejumlah besar pengguna membuat keputusan keuangan. Secara khusus, bagi pengguna dalam posisi itu untuk meminta laporan keuangan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Pengguna ini termasuk penyedia sumber daya bisnis seperti kreditur dan investor. Laporan keuangan juga mengidentifikasi tanggung jawab manajemen berdasarkan kepercayaan dalam mencapai tujuan mereka. (ED SAK EMKM 2016).

Laporan keuangan pengusaha menyusun laporan keuangan dengan basis akrual. Dalam akuntansi akrual, akun-akun diakui sebagai aset, kewajiban, modal, pendapatan dan beban jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuannya masing-masing. Sebagaimana digunakan oleh badan selain badan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis. Entitas menyusun laporan keuangan harus berdasarkan konsep dari entitas bisnis. Pemilik usaha harus mampu memisahkan transaksi yang berkaitan dengan bisnis dari transaksi pemilik bisnis tersebut maupun dari transaksi entitas lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika UMKM dalam pencatatan laporan keuangan menggunakan basis akrual, maka UMKM relatif siap untuk penerapan SAK EMKM. Disisi lain, jika UMKM belum mencatat laporan keuangan sama sekali atau telah mencatat laporan keuangan secara tunai, maka UMKM relatif belum siap untuk menerapkan SAK EMKM, karena SAK EMKM menggunakan asumsi dasar akrual yang membuat UMKM perlu melakukan penyesuaian

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui kuesioner yang disebarkan kepada UMKM yang berada di 5 Kecamatan Kota Medan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi data yang dimiliki Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang telah terdokumentasi dengan baik yang merupakan data UMKM yang selama ini disusun oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan serta teknik pemberian/penyebaran kuesioner, yaitu dengan memberikan pertanyaan tertulis mengenai pencatatan keuangan UMKM berbasis SAK EMKM. Instrumennya adalah angket/kuesioner

Hasil Dan Pembahasan

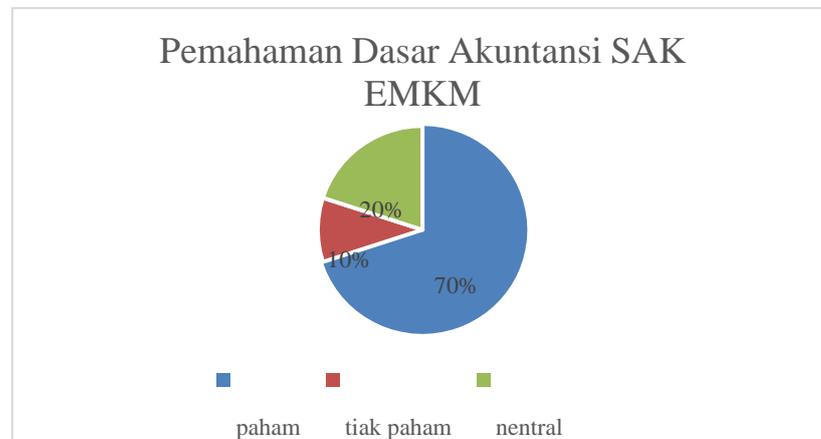
Hasil Penelitian

Hasil Data UMKM Binaan dinas koperasi kota medan yang tersebar di 21 kecamatan yang ada di Kota Medan yaitu pada tahun 2021 jumlah UMKM usaha mikro yaitu sebanyak 1546 unit usaha. yang di usaha kecil yaitu 115 unit usaha, dan yang di usaha menengah yaitu 11 unit usaha, maka dari itu peneliti mengambil sampel 5 kecamatan yang ada di kota Medan untuk dijadikan sampel Penelitian.

Berdasarkan hasil data yang didapatkan informasi dari responden dalam hal ini pengusaha UMKM di 5 Kecamatan, di Kota Medan, yang mana pelaku usaha didominasi oleh perempuan yang memiliki rentang usia 30 – 50 tahun dengan rentang pendidikan yaitu SMA Sederajat dengan lama usaha yang sudah berjalan hampir 9 tahun. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dari 10 responden yang dianalisis, responden yang dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha mikro dengan persentase 80%. Sedangkan persentase 30% merupakan pelaku usaha kecil.

Pada tahap ini, ada delapan pernyataan dalam survei untuk mengetahui seberapa baik pelaku UMKM memahami standar akuntansi untuk usaha kecil dan menengah (SAK EMKM). Dalam hal ini, hingga 10

responden mengatakan bahwa mereka adalah pemilik usaha kecil, menanggapi delapan pernyataan dan memahami standar akuntansi usaha kecil. Berikut ini adalah hasil dari diagram penelitian adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Pemahaman dasar Akuntansi SAK EMKM

Dari data yang diperoleh berdasarkan diagram lingkaran, diketahui 70% responden atau pemilik usaha mikro menyatakan tidak memahami tentang penerbitan standar akuntansi bagi usaha mikro kecil dan menengah terkait penerbitan SAK EMKM. Saya tidak mengatakan itu dipahami dengan baik sebagai 70%. Hal ini terlihat dari pernyataan responden yang mengakui adanya SAK EMKM, suatu standar yang mengatur tentang perlakuan akuntansi UMKM, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2018. UMKM yang diatur oleh SAK EMKM, yang tidak memahami atau tidak memenuhi persyaratan akuntansi SAK ETAP, tunduk pada standar UU No. 20 Tahun 2008. SAK EMKM Responden atau pengelola usaha kecil yang belum memahami standar perpajakan SAK EMKM adalah beban masa lalu, sehingga cukup untuk mencatat aset dan kewajiban sebagai beban. Hal ini terlihat dari hasil tanggapan dari usaha mikro yang disurvei yang rata-rata menunjukkan bahwa mereka tidak memahami sekitar 70% dari pernyataan.

PEMBAHASAN

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa 70%-90% responden atau pengelola usaha UMKM menyatakan tidak memahami tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi SAK EMKM. Hal ini dibuktikan dari pernyataan responden yang menyatakan tidak memahami standar proses akuntansi UMKM, SAK EMKM yang diterapkan pada 1 Januari 2018. Bahkan, pengelola UMKM yang belum memahami bahwa dasar pengenaan pajak SAK EMKM adalah biaya perolehan. Namun pada usaha kecil telah melakukan pencatatan laporan keuangan secara sederhana yaitu hanya mencatat kas masuk dan kas keluar.

Dikarenakan minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan UMKM, maka divisi pengembangan UKM pemko Medan membuat jadwal khusus diridalam melaksanakan sosialisasi keuangan untuk dapat mengelola keuangan usaha. Sosialisasi keuangan yang berkelanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemangku kepentingan UMKM di Medan dan memahami pengelolaan keuangan perusahaan yang baik dan benar, yang tentunya akan berdampak positif. Peningkatan pemahaman keuangan dalam manajemen masyarakat berdampak pada keuangan yang dapat mencegah perusahaan dari kegagalan, sehingga UKM terus tumbuh dan berkelanjutan. Laporan keuangan yang tepat, jelas dan akurat dapat memberikan informasi yang berguna terkait permodalan usaha. Strategi untuk mendukung keberlangsungan usaha pemahaman dalam laporan keuangan. Kemajuan dan perkembangan bisnis dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh para pengelola UMKM di Kota Medan juga sangat bervariasi. Usaha Menengah memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dari pada usaha kecil bila diukur terhadap standar bisnis. Usaha menengah memiliki pemahaman dan keterampilan SDM yang lebih berkualitas, serta SDM yang sangat baik untuk mendukung penyusunan laporan keuangan usaha sehingga dapat menghasilkan laporan yang lebih berkualitas. Artinya, UMKM memiliki pola akuntabilitas yang berbeda. Usaha kecil yang biasanya dimiliki dan dikendalikan oleh pihak yang sama, sedangkan usaha menengah memiliki banyak pemangku kepentingan (pemilik, pihak ketiga), karena memiliki pola akuntabilitas yang lebih luas kepada banyak orang (Pulungan and Suwita 2020).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto Kota Medan. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan proses jangka panjang dari pertumbuhan produk

domestik bruto. Perekonomian suatu negara dikatakan tumbuh atau berkembang apabila output meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.

Di tengah situasi sulitnya memperoleh akses permodalan karena Pandemi saat ini, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para UMKM binaan dinas koperasi Dan UKM Kota Medan, antara lain dengan membentuk pola kemitraan dengan pemasok bahan baku atau kemitraan dengankelompok usaha besar. Dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, keberadaan UMKM yang dibawah binaan Dinas koperasi Dan UKM Kota Medan harus dituntut untuk menjaga kemampuannya bersaing dengan pelaku usaha lainnya, karena UMKM dinilai cukup representatif dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan strategi yang dapat mengembangkan UMKM. Dari sisi moral, kerjasama ini diperlukan untuk mendapatkan dukungan maksimal dari pengusaha besar melalui pembinaan dan juga adanya tanggung jawab sosial Perusahaan (Siyamtinah dan Rahmani, 2008). Maka dari itu Dinas Koperasi dan UKM kota medan terus melakukan kolaborasi dan binaan terhadap UKM yang berada di bawah naungan UMKM binaan mereka berikut data UMKM binaan dinas koperasi Dan UKM Kota medan tahun 2021.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, diketahui bahwa sebagian besar pengelola UMKM hanya memahami dasar-dasar akuntansi secara umum, namun belum memahami penerapan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pelaku UMKM terkait SAK EMKM masih sangat terbatas, sehingga mereka belum mampu menerapkannya dalam pencatatan keuangan usahanya. Oleh karena itu, disarankan agar pelaku UMKM mulai menerapkan akuntansi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mendukung kelangsungan dan perkembangan usahanya. Dalam hal ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menetapkan SAK EMKM sebagai standar yang dirancang agar mudah digunakan dan dipahami oleh pelaku UMKM serta para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, DSAK IAI, pemerintah daerah—dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan—beserta pemangku kepentingan lainnya perlu terus melakukan sosialisasi secara intensif mengenai pentingnya akuntansi berbasis standar. DSAK IAI juga diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis dan penjelasan yang komprehensif mengenai hubungan antara akuntansi dan peningkatan performa bisnis UMKM. Hal ini penting dilakukan mengingat masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami dan menyadari manfaat dari penerapan SAK EMKM dalam kegiatan usahanya.

Referensi

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). *Management control systems* (12th ed.). McGraw-Hill.
- Berger, A. N., & Udell, G. F. (2006). A more complete conceptual framework for SME finance. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2945-2966. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.008>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management* (15th ed.). Cengage Learning.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Business research methods* (12th ed.). McGraw-Hill.
- Djuhari, D. (2012). Analisis terhadap pemahaman akuntansi penyusunan laporan keuangan BKM. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 45-60.
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2018). *Managerial accounting* (16th ed.). McGraw-Hill.
- Hasan, A., & Gusnardi. (2018). *Prospek implementasi standar akuntansi: Entitas mikro kecil dan menengah berbasis kualitas laporan keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2018*. SadariPress.
- Hasibuan, M. (2021). *Manajemen UMKM: Teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hornigren, C. T., Sundem, G. L., Elliott, J. A., & Philbrick, D. (2018). *Introduction to financial accounting* (11th ed.). Pearson.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah*. IAI.

- Ismanto, H., & Diman, T. (2014). Analisis efektivitas pemberian pinjaman program pembiayaan UMKM oleh koperasi. *Jurnal Economia*, 10(2), 145-160.
- Kartika, S. E., Pupaningrum, D. A., & Widowati. (2021). Tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM di Kota Mataram dalam implementasi SAK EMKM. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 23-35.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Strategi pengembangan UMKM di era digital*.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate accounting* (17th ed.). Wiley.
- Myers, S. C., & Brealey, R. A. (2018). *Principles of corporate finance* (12th ed.). McGraw-Hill.
- OECD. (2018). *SME policy index: Indonesia 2018*. OECD Publishing.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2016). *Fundamentals of corporate finance* (11th ed.). McGraw-Hill.
- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. World Economic Forum.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulisti, T. (2019). *Analisis tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM)* [Skripsi tidak diterbitkan]. UIN Raden Intan Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Utami, C. W., & Lantu, D. C. (2018). *Kewirausahaan: Teori dan praktik*. IPB Press.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2020). *Financial and managerial accounting* (14th ed.). Cengage Learning.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Yuliarti, M. S. (2020). *Akuntansi untuk UMKM*. Penerbit Andi.